



RENJA

RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2024

*PEMERINTAH KABUPATEN
HALIMAHE UTARA*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas karunia kepada kami sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024

Rencana Kerja tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.

Dalam urusan Kesehatan Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang diperkirakan akan terjadi.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Kepala Dinas Kesehatan



Selpianus H. Kaya, S.Kep
NIP. 196809011998031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	48
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	84
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	87
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	87
3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD	88
3.3 Program dan Kegiatan	92
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	99
BAB V PENUTUP	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja PD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang – Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD, serta untuk mendukung sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode I (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Kesehatan sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah, khususnya pembangunan kesehatan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Kesehatan, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan PD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra PD yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk waktu satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan mengacu pada kerangka yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Kesehatan merupakan dokumen resmi yang dipergunakan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan khususnya. Oleh karena itu, penyusunan Renja Dinas Kesehatan dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan fokus melakukan pengkajian terhadap kondisi yang ada (existing) di Dinas Kesehatan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024

diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Pokir Dewan, Forum PD dan Musrenbang Kabupaten.

Dari kegiatan tersebut disusunlah pagu anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (PD) untuk diajukan ke Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 - 2026 serta aspirasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Kesehatan dilengkapi dengan indikator program dan kegiatan.

Hubungan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan dengan dokumen perencanaan lainnya jelas cukup relevan sebagaimana dapat diuraikan antara lain :

1. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 mengacu dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yang dalam penyusunannya memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 – 2026.
2. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sebaliknya.
3. Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang telah dirumuskan menjadi kerangka acuan dalam penyusunan pagu indikatif.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2016 no 114, tambahan Lembaran Negara RI 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara;
18. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2022, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja Tahun 2024 bagi Dinas Kesehatan, mengacu pada RPJPD Tahun 2005- 2025 dan RPJMD Tahun 2021- 2026. Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024, Kabupaten Halmahera Utara :

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024
2. Sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas pada akhir tahun anggaran

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2024, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan
2. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan PD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD)
3. Agar terjamin sinergisitas, sinkronisasi, dan Integritas Rencana Kerja Dinas Kesehatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD

- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti NSPK, SPM dan SDG'S
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam Sub bab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.
- c. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

3.3 Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal: pencapaian SDG'S, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dsb.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program , jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar keberbagai kawasan dan apa saja terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

- d. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2022****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022**

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara merupakan proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara. Pengukuran kinerja dilakukan pada indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra dan Renja, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Tahapan evaluasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses perencanaan. Tahapan evaluasi dimaksudkan untuk menilai sudah sejauh mana proses perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan. Tahapan evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berdampak pada terhambatnya proses pelaksanaan rencana pembangunan oleh Perangkat Daerah tersebut. Hasil evaluasi tersebut, selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan atau langkah-langkah strategis dalam perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara telah dapat melaksanakan tujuan, pokok dan fungsinya untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat teknis di bidang kesehatan. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi program, kegiatan, dan sub

kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sedangkan kinerja dan indikator program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Valid Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut, Dinas Kesehatan telah menyesuaikan Dokumen Renstra dan Dokumen Renja sehingga untuk evaluasi renja tahun 2022 telah menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru.

TABEL T-C. 29

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO		URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.01		BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah (persen)	%	90	96,1	106,7	44.553.553.357,00	42.316.538.138,00	95			
	1.02.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi Dokumen Renja Terhadap Renstra (persen)	%	100	100	100	33.607.500,00	33.607.500,00	100			
						Persentase konsistensi Dokumen Renja Terhadap RKPD (persen)	%	100	100	100						

	2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rerencanaan PD	Dok	1	1	100	14.088.000	14.088.000	100			
	2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	100	2.110.000	2.110.000	100			
	2.01.03			2. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 04 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD-P) Tahun 2022	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	100	2.110.000	2.110.000	100			
	2.01.04				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	1	100	2.110.000	2.110.000	100			
	2.01.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	100	2.110.000	2.110.000	100			

	2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	1	1	100	7.789.500	7.789.500	100			
	2.01.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Dok	1	1	100	3.290.000	3.290.000	100			
	1.02.01.2.02			3. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 61 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)	%	100	70,5	70,55	41.851.518.657,00	40.600.744.459	97			
	01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	13624	11915	87,46	41.842.309.657	40.591.535.459	97			

	01.2.02.05			dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1	100	9.209.000	9.209.000	100			
	1.02.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100	1.817.608.600	1.143.625.295	63			
	01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Paket	1	1	100	4.585.000	4.558.000	99			
	01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	186.986.800	43.056.000	23			
	01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100	62.267.000	61.580.000	99			
	01.2.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dok	1	1	100	13.473.000	13.000.000	96			

					undangan	undangan yang Disediakan										
	01.2.06.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100	48.270.000	48.244.000	100			
	01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	1.502.026.800	973.187.295	65			
	1.02.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Realisasi Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	401.217.000	313.964.284	78			
	1.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100	86.706.000	86.618.000	100			
	1.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	1	100	205.908.000	118.744.284	58			

	1.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	100	29.200.000	29.200.000	100			
	1.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	100	79.403.000	79.402.000	100			
	1.02.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100	449.601.600	224.596.600	50			
	1.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	100	249.601.600	174.596.600	70	Kegiatan Sudah Dilaksanakan tapi anggaran yang tidak cair	Dianggarkan Ulang sebagai Hutang Belanja di Tahun 2023	
	1.2.09.11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/D	Unit	1	1	100	200.000.000	50.000.000	25			

						irehabilitasi										
1.02.02					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rata-rata pemenuhan 12 jenis SPM Bidang Kesehatan	%	79,20%	90%	113,6	99.945.164.596	63.843.057.944	64			
						Persentase Puskesmas terakreditasi	%	84,21%	74%	87,88						
						Cakupan Desa Universal Child Immunization (Persen)	%	71,90%	53%	74,13						
	1.02.02.2.01				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase rata-rata Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terstandar	%	80	80	100	35.464.508.678	22.800.775.611	64			
	02.2.01.03				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	4	4	100	500.000.000	390.505.784	78	Kegiatan Sudah Dilaksanakan tapi anggaran yang tidak cair	Dianggarkan Ulang sebagai Hutang Belanja di Tahun 2023	

	02.2.01.06				Pembangu nan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	3	3	100	4.604.910.000	3.860.301.164	84	Kegiatan Sudah Dilaksanakan tapi anggaran yang tidak cair	Dianggara nkan Ulang sebagai Hutang Belanja di Tahun 2023	
	02.2.01.13				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaa n oleh Fasilitas Kesehatan Lainya	Unit	14	14	100	8.327.149.025	6.856.239.000	82	Kegiatan Sudah Dilaksanakan tapi anggaran yang tidak cair	Dianggara nkan Ulang sebagai Hutang Belanja di Tahun 2023	
	02.2.01.14				Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Palayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	19	19	100	7.259.396.944	5.810.574.118,00	80	Kegiatan Sudah Dilaksanakan tapi anggaran yang tidak cair	Dianggara nkan Ulang sebagai Hutang Belanja di Tahun 2023	
	02.2.01.16				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	Paket	1	1	100	7.973.265.570	3.097.168.742,00	39	Kegiatan Sudah Dilaksanakan tapi anggaran yang tidak cair	Dianggara nkan Ulang sebagai Hutang Belanja di Tahun 2023	

02.2.01.17					Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	Paket	35	35	100	6.799.787.139	2.785.986.803	41	Kegiatan Sudah Dilaksanakan tapi anggaran yang tidak cair	Dianggarkan Ulang sebagai Hutang Belanja di Tahun 2023	
1.02.02.2.02					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Presentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	65	75	115	64.480.655.918	41.042.282.333	64			
						Presntase Desa STBM	%	30%	31%	103						
						Angka Prevalensi Malaria	Per 1000 pddk	0,3	0,3	100						
						Persentase ibu hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	100	96	96						
						Persentase ibu bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan Persalinan	%	100	88	88						
						Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	100	96	96						

						Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	100	93	93					
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar	%	100	96	96					
						Persentase orang usia 15-19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	76	76					
						Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	%	100	91	91					
						Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100					

						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100						
						Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100						
						Persentase orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	%	100	74	74						
						Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	74	74						
	02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	3981	3325	84	402.476.000	280.462.000	70			
	02.2.02.02				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Orang	3800	3200	84	2.704.994.000	969.034.000,00	36			

					Bersalin											
	02.2.02.03				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	Orang	3620	3143	87	101.536.000	74.627.000,00	73			
	02.2.02.05				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pendidikan Dasar	Orang	64299	10.128	16	164.629.000	151.634.000,00	92			
	02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard Lanjut	Orang	12095	6672	55	71.149.000	68.129.000	96			
	02.2.02.10				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	Orang	12	58	483	75.000.000	70.860.000	94			

	02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	8207	4479	55	125.000.000	84.810.000	68			
	02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dok	1	1	100	916.223.200	700.752.000,00	76			
	02.2.02.16				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dok	1	1	100	85.467.000	70.236.000,00	82			
	02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dok	1	1	100	370.921.000	273.958.000	74			
	02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dok	1	1	100	125.000.000	63.260.000	51			
	02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dok	1	1	100	21.156.884.518	13.767.804.988,00	65	Kegiatan Sudah Dilaksanakan tapi anggaran yang tidak cair	Dianggarkan Ulang sebagai Hutang Belanja di Tahun 2023	

	02.2.02.26				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dok	1	1	100	18.586.965.486	12.863.583.300	69			
	02.2.02.30				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi Jarak jauh antar Fasyankes melalui Pelayanan Telemedicine untuk mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	6	6	100	1.424.997.400	1.141.197.400	80			
	02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dok	19	19	100	15.398.515.114	9.478.937.000,00	62	Kegiatan Sudah Dilaksanakan tapi anggaran yang tidak cair	Dianggarkan Ulang sebagai Hutang Belanja di Tahun 2023	

	02.2.02.34				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dok	2	2	100	2.494.578.200	982.997.645	39	Kegiatan Sudah Dilaksanakan tapi anggaran yang tidak cair	Dianggarkan Ulang sebagai Hutang Belanja di Tahun 2023	
	02.2.02.35				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten Kota	Unit	6	0	0	276.320.000	-	0			
1.02.03					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter per satuan penduduk (per 2500 penduduk)	Per 2500 pddk	0,97	0,69	71	9.023.591.104	5.172.256.066	57			
	1.02.03.2.02				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM di Wilayah Kabupaten /Kota	Persentase desa yang memiliki Tenaga Kesehatan	%	80	80	100	9.023.591.104	5.172.256.066	57			
						Rasio Bidan per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	Per 1000 pddk	2,79	2,37	85						
						Rasio Perawat per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	Per 1000 pddk	3,67	2,23	61						
	03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan	Orang	227	224	99	9.023.591.104	5.172.256.066,00	57	Kegiatan Sudah Dilaksanakan tapi anggaran yang tidak cair	Dianggarkan Ulang sebagai Hutang Belanja di Tahun	

						Kesehatan (Fasyankes)										2023	
1.02.04					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHAT AN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasia n (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyarata n Perizinan	%	81,82	83,33	102	593.484.000	118.630.000	20				
	02.04.2.03				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase peningkatan Jumlah P- IRT yang memiliki Sertifikat	%	38	38	100	436.282.000	118.630.000	27				
04.2.03.01	04.2.03.01				Pengendali an dan Pengawasi an serta Tindak	Jumlah Dokumen Hasil Pengendali an dan	Dok	1	1	100	436.282.000	118.630.000	27	Kegiatan Sudah Dilaksanakan tapi anggaran yang tidak	Dianggara nkan Ulang sebagai		

					Lanjut Pengawasa n Sertifikat ProduksiPa ngan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengawasa n serta Tindak Lanjut Pengawasa n Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								cair	Hutang Belanja di Tahun 2023	
	02.04.2.06				Pemeriksa an dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa an Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase P-IRT yang di monitoring	%	77	77	100	157.202.000	-	0			

	04.2.06.01				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar yang dilakukan Pemeriksaan <i>n Post market</i> dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Unit	50	26	52	157.202.000	-	0	Kegiatan Sudah Dilaksanakan tapi anggaran yang tidak cair	Dianggarkan Ulang sebagai Hutang Belanja di Tahun 2023	
1.02.05					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	%	71,70	71,70	100	177.085.000	135.640.000	77			
						Rasio jumlah posbindu PTM terhadap jumlah Desa (persen)	%	89,80	89,80	100						
	02.05.2.01				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	Persentase Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Germas	%	78	78	100	177.085.000	135.640.000	77			

					Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota											
	05.2.01.01				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dok	1	1	100	177.085.000	135.640.000	77			
JUMLAH TOTAL										97,33	154.292.878.057	111.586.122.148	70,55			

Dilihat dari Tabel TC. 29, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan telah mengacu pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 dimana terdapat 5 (lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) Sub Kegiatan. Pada tahun 2022, terdapat 5 indikator program yang telah mencapai target (90%); 10 indikator kegiatan mencapai target (100%) dan 1 indikator kegiatan tidak mencapai target (70,5%); 45 indikator sub kegiatan telah mencapai target (100%) dan 3 indikator sub kegiatan tidak mencapai target (55%).

1. Realisasi indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja terdiri dari:

a. Indikator Program yang tidak mencapai target:

- Tidak terdapat indikator yang tidak mencapai target

b. Indikator Kegiatan yang tidak mencapai target:

- Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah (persen)
- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
- Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan
- Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
- Persentase orang usia 15-19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
- Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
- Rasio bidan per satuan penduduk (per 1000 penduduk)
- Rasio perawat per satuan penduduk (per 1000 penduduk)

c. Indikator Sub Kegiatan yang tidak mencapai target:

- Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil
- Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
- Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
- Jumlah anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pendidikan Dasar
- Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar lanjut

- Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
 - Jumlah sumber daya manusia Kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)
2. Realisasi indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah mencapai target kinerja terdiri dari:
- a. Indikator Program yang telah mencapai target:
- Tingkat capaian kinerja perangkat daerah
 - Persentase rata-rata pemenuhan 12 jenis SPM bidang kesehatan
 - Persentase Puskesmas terakreditasi
 - Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)
 - Rasio dokter per satuan penduduk (per 2500 penduduk)
 - Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan
 - Persentase posyandu aktif
 - Rasio jumlah posbindu PTM terhadap jumlah desa (persen)
- b. Indikator kegiatan yang telah mencapai target:
- Persentase konsistensi Dokumen Renja terhadap Renstra (persen)
 - Persentase konsistensi Dokumen Renja terhadap Dokumen RKPD (persen)
 - Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah (persen)
 - Persentase realisasi kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik
 - Persentase rata-rata ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstandar
 - Angka prevalensi malaria
 - Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
 - Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
 - Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
 - Persentase desa yang memiliki tenaga Kesehatan
 - Persentase peningkatan jumlah P-IRT yang memiliki sertifikat
 - Persentase P-IRT yang dimonitoring
 - Persentase kecamatan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kamoanye Germas

c. Indikator sub kegiatan yang telah mencapai target:

- Jumlah dokumen perencanaan PD
- Jumlah dokumen RKA-SKPD
- Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD
- Jumlah dokumen DPA-SKPD
- Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD
- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Jumlah dokumen kinerja perangkat daerah
- Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan keuangan akhir tahun SKPD
- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
- Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
- Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu
- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
- Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
- Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
- Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
- Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun
- Jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang dibangun
- Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya
- Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan
- Jumlah obat dan vaksin yang disediakan
- Jumlah bahan habis pakai yang disediakan

- Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
 - Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
 - Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
 - Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan
 - Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 - Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
 - Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas
 - Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
 - Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
 - Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
3. Realisasi indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja terdiri dari:
- a. Indikator program yang melebihi target kinerja:
- Tingkat capaian kinerja perangkat daerah
 - Persentase rata-rata pemenuhan 12 jenis SPM bidang kesehatan
- b. Indikator kegiatan yang melebihi target:
- Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif
 - Persentase desa STBM
 - Persentase kecamatan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Germas
- Dilihat dari capaian indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara, terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum mencapai target hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
- Belum semua Tenaga Kesehatan (Bidan) mendapat Pelatihan ANC
 - Keterbatasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Bidan) di beberapa Puskesmas belum sesuai kebutuhan
 - Masih adanya ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan kehamilan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sehingga tidak termonitor status kehamilannya
 - Penyebaran tenaga kesehatan tidak merata di 19 Puskesmas yang berada di Kabupaten Halmahera Utara

- Sumber pembiayaan untuk pencapaian target SPM bidang Kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas hanya bersumber dari DAK Non Fisik
- Keterlambatan pengiriman logistik HIV dan TBC (Cartidge TCM) ke Dinas Kesehatan
- Kondisi Vaccine Refrigerator di 19 Puskesmas kurang baik (Rusak) disebabkan karena arus listrik yang tidak stabil

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022

NO	NO REK	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.553.553.357,00	42.316.538.138,00	95
A	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.607.500,00	33.607.500,00	100
	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.088.000	14.088.000	100
	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.110.000	2.110.000	100
	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.110.000	2.110.000	100
	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.110.000	2.110.000	100
	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.110.000	2.110.000	100
	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.789.500	7.789.500	100
	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.290.000	3.290.000	100
B	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.851.518.657,00	40.600.744.459	97
	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.842.309.657	40.591.535.459	97
	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.209.000	9.209.000	100
C	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.817.608.600	1.143.625.295	63
	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.585.000	4.558.000	99
	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.986.800	43.056.000	23
	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.267.000	61.580.000	99
	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.473.000	13.000.000	96
	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.270.000	48.244.000	100
	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.502.026.800	973.187.295	65
D	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.217.000	313.964.284	78
	1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.706.000	86.618.000	100

	1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.908.000	118.744.284	58
	1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.200.000	29.200.000	100
	1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.403.000	79.402.000	100
E	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.601.600	224.596.600	50
	1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.601.600	174.596.600	70
	1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	50.000.000	25
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	99.945.164.596	63.843.057.944	64
A	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35.464.508.678	22.800.775.611	64
	02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	500.000.000	390.505.784	78
	02.2.01.06	Pembangunan Puskesmas	4.604.910.000	3.860.301.164	84
	02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.327.149.025	6.856.239.000	82
	02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.259.396.944	5.810.574.118,00	80
	02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	7.973.265.570	3.097.168.742,00	39
	02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	6.799.787.139	2.785.986.803	41
B	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.480.655.918	41.042.282.333	64
	02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	402.476.000	280.462.000	70
	02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.704.994.000	969.034.000,00	36
	02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	101.536.000	74.627.000,00	73
	02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	164.629.000	151.634.000,00	92
	02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	71.149.000	68.129.000	96
	02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	75.000.000	70.860.000	94
	02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	125.000.000	84.810.000	68
	02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	916.223.200	700.752.000,00	76
	02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	85.467.000	70.236.000,00	82
	02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	370.921.000	273.958.000	74
	02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	125.000.000	63.260.000	51
	02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21.156.884.518	13.767.804.988,00	65
	02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	18.586.965.486	12.863.583.300	69

	02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.424.997.400	1.141.197.400	80
	02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	15.398.515.114	9.478.937.000,00	62
	02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.494.578.200	982.997.645	39
	02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	276.320.000	-	0
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9.023.591.104	5.172.256.066	57
A	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9.023.591.104	5.172.256.066	57
	03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	9.023.591.104	5.172.256.066,00	57
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	593.484.000	118.630.000	20
A	02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	436.282.000	118.630.000	27
	04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	436.282.000	118.630.000	27
B	02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	157.202.000	-	0
	04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	157.202.000	-	0
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	177.085.000	135.640.000	77
A	02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	177.085.000	135.640.000	77
	05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	177.085.000	135.640.000	77
JUMLAH TOTAL			154.292.878.057	111.586.122.148	70,55

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Dalam penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan dalam periode kepemimpinan 2021-2026, menentukan indikator dalam pelaksanaan pelayanan Dinkes untuk mencoba merumuskan indikator yang lebih terukur dan tepat

sasaran. Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka urusan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara memiliki tugas dan tanggung jawab yang setara dengan perangkat daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar sesuai Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, dan IKU (Indikator Kinerja Utama), Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memeberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya maupun pelayanan kesehatan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

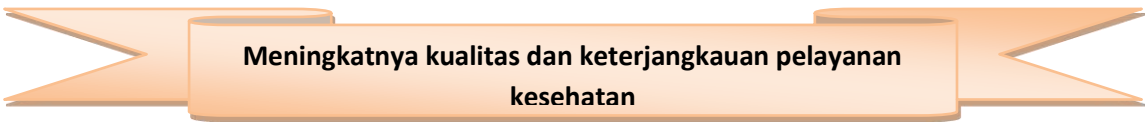
TABEL T-C 30.a
PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALIASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Keluarga Sehat		√	30	35	40	45			35	40	
2	Angka Kematian ibu (AKI) per 100,000 Kelahiran Hidup		√	104	100,5	97	93,5	123	100	100,5	97	
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup		√	6	6	6	6	9	6	6	6	
4	Prevalensi Stunting pada Balita (Persen)		√	18,09	17,07	16,05	15,02	19	16,5	17,07	16,05	
5	Prevalensi Wasting pada Balita (Persen)		√	7,62	6,97	6,31	5,66	8	6,31	6,97	6,31	
6	Rasio Puskesmas terakreditasi terhadap jumlah penduduk (per16ribu penduduk)		√	1,21	1,25	1,29	1,33	1,12	1,35	1,25	1,29	

7	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk (per 1000 penduduk)		√	1,1	1,13	1,16	1,18	0,79	1,13	1,13	1,16	
8	Nilai Sakip Perangkat Daerah		√	80	80	85	85	70	80	80	85	

Capaian kinerja ini disusun berdasarkan penjabaran sasaran yang menunjang pencapaian masing-masing misi dengan uraian sebagai berikut:

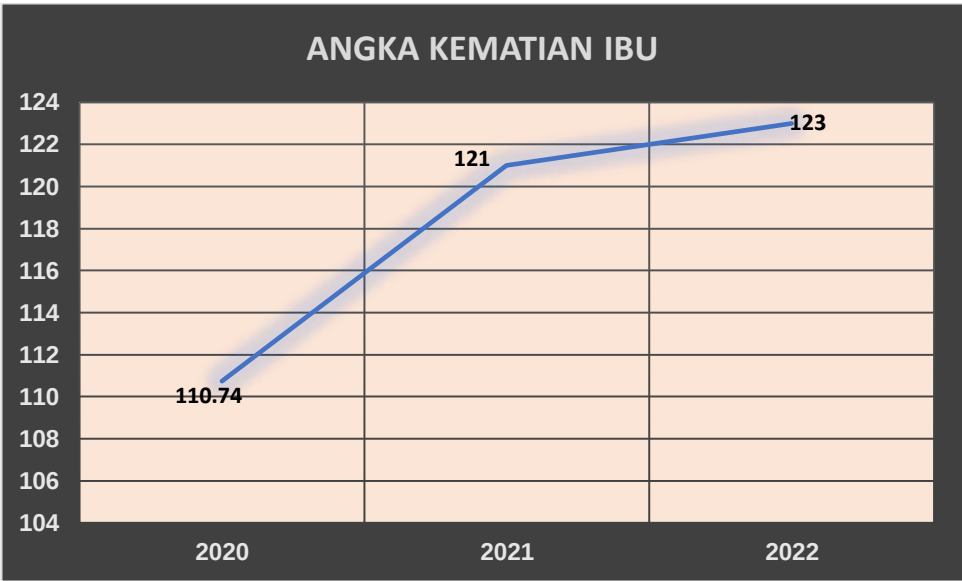
Sasaran Strategis I :



Sasaran strategis ini diukur dengan 5 indikator yang diusung. Hasil pengukuran menunjukkan 1 indikator memiliki capaian kinerja **Baik** dengan persentase **84,55%**. Hasil pengukuran 1 indikator memiliki capaian kinerja **Baik** dengan persentase **100%**. Hasil pengukuran 1 indikator memiliki capaian kinerja **Baik** dengan persentase **95,25%**. Hasil pengukuran 1 indikator memiliki capaian kinerja **Baik** dengan persentase **99,47%**. Sedangkan hasil pengukuran 1 indikator memiliki capaian kinerja **Cukup** dengan persentase **66,67%**.

A. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

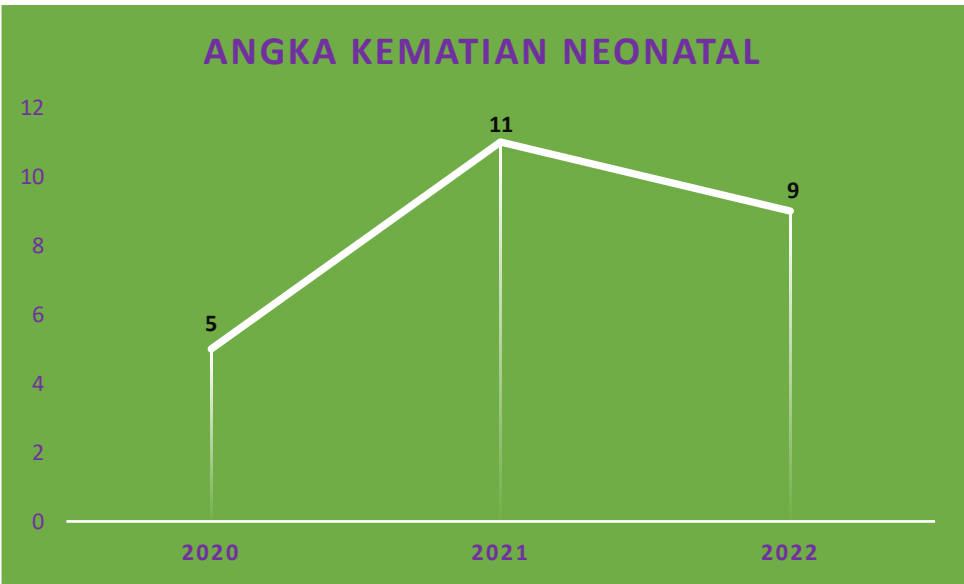


Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Halmahera Utara mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir. Tahun 2020 kematian ibu sebanyak 4 ibu dari 3612 kelahiran hidup atau 110,74/100.000 kelahiran hidup dan Tahun 2021 kematian ibu sebanyak 4 ibu dari 3300 kelahiran hidup atau 121/100.000 Kelahiran Hidup sedangkan di Tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu kematian ibu sebanyak 4 ibu dari 3265 kelahiran hidup

atau 123/100.000 kelahiran hidup. Namun angka ini menunjukkan bahwa angka kematian ibu masih memenuhi target nasional yaitu 183/100.000 kelahiran hidup (target nasional sampai dengan Tahun 2024 yaitu 183/100.000 kelahiran hidup). Pada Tahun 2022 kematian Ibu terjadi di kecamatan Kao sebanyak 1 ibu penyebabnya yaitu Penyakit TBC, di Kecamatan Kao Barat kematian ibu sebanyak 1 ibu penyebabnya yaitu perdarahan, sedangkan Kecamatan Tobelo dan Kecamatan Dorume kematian ibu penyebabnya lain-lain.

Dalam Upaya untuk menekan dan meminimalkan jumlah angka kematian ibu serta mempertahankan dan meningkatkan cakupan pertolongan persalinan maka di Tahun 2023 Halmahera Utara diadakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesga, Pendampingan kelas ibu hamil dan ibu balita, Kalakarya MTBS, Pendampingan penguatan P4K, Penguatan Program Bayi Baru lahir, Pendampingan Tim Ahli ke Puskesmas dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal Neonatal, Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrinning Layak Hamil, ANC dan Stunting serta mengevaluasi penyebab kematian ibu sebelumnya dengan dilaksanakannya Audit Maternal Perinatal (AMP), serta Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) yang dibiayai dari APBN dan APBD untuk meningkatkan pertolongan persalinan yang di lakukan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan

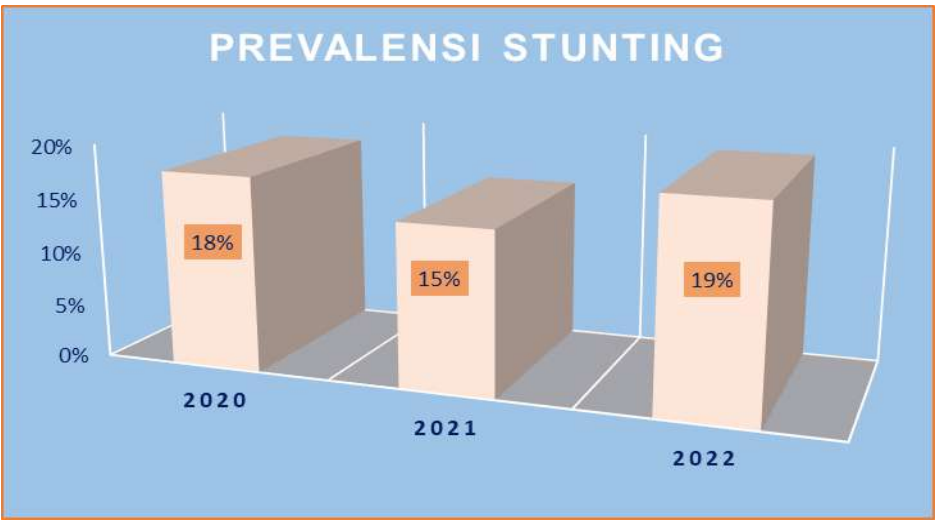
2. Angka Kematian Neonatal (AKN)



Angka Kematian Neonatal (AKN) di Kabupaten Halmahera Utara berfluktuasi selama 2 tahun terakhir, pada Tahun 2020 angka kematian neonatal sebanyak 19 neonatal dari 3612 bayi lahir hidup atau 5 /1.000 Kelahiran Hidup. Tahun 2021 Angka kematian bayi tahun 2021 kematian neonatal sebanyak 30 neonatal dari 2766 bayi lahir hidup atau 11/1000

kelahiran hidup sedangkan di Tahun 2022 angka kematian neonatal sebanyak 29 neonatal dari 3265 bayi lahir hidup atau 9/1.000 kelahiran hidup. Angka kematian Neonatal masih memenuhi target nasional yaitu 16/1.000 Kelahiran Hidup dan Target Propinsi 12/1.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Neonatal terbanyak di Kecamatan Kao, Tobelo Barat, Tobelo Tengah, Galela, Galela Barat, Galela Utara, Dorume, Supu, Kao Barat, Malifut, Tobelo Selatan, Tobelo Timur dan Tobelo Utara. Kematian neonatal disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini ibu hamil malas datang ke posyandu dan persalinan tidak dilakukan di fasilitas kesehatan dan masih ditolong dukun. Dalam Upaya untuk menekan dan meminimalkan jumlah angka kematian ibu serta mempertahankan dan meningkatkan cakupan pertolongan persalinan maka di Tahun 2023 Halmahera Utara diadakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesga, Pendampingan kelas ibu hamil dan ibu balita, Kalakarya MTBS, Pendampingan penguatan P4K, Penguatan Program Bayi Baru lahir, Pendampingan Tim Ahli ke Puskesmas dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal Neonatal, Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrinning Layak Hamil, ANC dan Stunting serta mengevaluasi penyebab kematian ibu sebelumnya dengan dilaksanakannya Audit Maternal Perinatal (AMP), serta Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) yang dibiayai dari APBN dan APBD untuk meningkatkan pertolongan persalinan yang di lakukan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan

3. Prevalensi Stunting pada Balita



Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup membahayakan. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu

penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.

Prevalensi stunting di Kabupaten Halmahera Utara berfluktuasi dalam 2 Tahun terakhir. Pada Tahun 2020 prevalensi stunting yaitu 18%, Tahun 2021 prevalensi stunting yaitu 15% sedangkan Tahun 2022 prevalensi stunting mencapai 19%. Prevalensi stunting masih melebihi target Nasional (14%) dan Propinsi (14%). Hal ini disebabkan karena pencatatan dan pelaporan semakin baik sehingga banyak kasus yang didapatkan.

Dalam Upaya untuk menekan dan meminimalkan prevalensi stunting maka di Tahun 2023 Halmahera Utara mengadakan Kegiatan Penetapan DEsa Lokus Stunting, Pembinaan Kader KPM, Rapat Manajemen Data Intervensi Stunting Terintegrasi, Pengukuran dan Publikasi Stunting, Reviuw Kinerja Tahunan, Pengadaan Penambahan Antropometri KIT serta Pengadaan PMT Lokal.

4. Prevalensi Wasting Pada Balita



Wasting adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan (akut) dan parah. Pemicu wasting biasanya dikarenakan anak terkena diare sehingga berat badannya turun drastis tapi tinggi badannya tidak bermasalah. Wasting tidak dapat dianggap sepele sebab jika penanganannya terlambat bisa berakibat fatal dan menyebabkan kematian.

Di Kabupaten Halmahera Utara prevalensi wasting berfluktuasif dalam 2 Tahun terakhir. Pada Tahun 2020 prevalensi wasting yaitu 9%, Tahun 2021 prevalensi wasting yaitu 6% sedangkan Tahun 2022 prevalensi wasting

mencapai 8%. Prevalensi wasting masih melebihi target nasional (7%) dan target propinsi (7%). Hal ini disebabkan karena pencatatan dan pelaporan semakin baik sehingga banyak kasus yang didapatkan.

Dalam Upaya untuk menekan dan meminimalkan prevalensi stunting maka di Tahun 2023 Halmahera Utara mengadakan Kegiatan Penetapan Desa Lokus Stunting, Pembinaan Kader KPM, Rapat Manajemen Data Intervensi Stunting Terintegrasi, Pengukuran dan Publikasi Stunting, Reviu Kinerja Tahunan, Pengadaan Penambahan Antropometri KIT serta Pengadaan PMT Lokal.

5. Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Madya

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap pasien. Salah satu cara untuk menilai mutu kualitas pelayanan Puskesmas dilakukan dengan akreditasi. Tujuan diberlakukannya Akreditasi Puskesmas adalah untuk membina Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dalam upaya untuk berkelanjutan memperbaiki sistem pelayanan dan kinerja yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, keselamatan dan manajemen risiko.

Di Kabupaten Halmahera Utara sudah sebanyak 14 Puskesmas yang telah terakreditasi. Tahun 2017 ada 2 (dua) Puskesmas yang terakreditasi Dasar yaitu Puskesmas Tobelo dan Puskesmas Kupa-Kupa, Tahun 2018 ada 3 (tiga) Puskesmas yang terakreditasi Dasar yaitu Puskesmas Kao, Puskesmas Kusuri, Puskesmas Gorua dan ada 3 (tiga) Puskesmas yang terakreditasi Madya yaitu Puskesmas Mawea, Puskesmas Pitu dan Puskesmas Galela, dan Tahun 2019 ada 1 Puskesmas yang terakreditasi dasar yaitu Puskesmas Daru, yang terakreditasi Madya ada 4 Puskesmas yaitu Puskesmas Malifut, Puskesmas Soakonora, Puskesmas Dokulamo, dan Puskesmas Salimuli serta 1 (satu) Puskesmas yang terakreditasi Utama yaitu Puskesmas Toliwang.

Pada tahun 2020 juga sebanyak 5 puskesmas yaitu Puskesmas Dum-Dum, Puskesmas Bobaneigo, Puskesmas, Supu, Puskesmas Dorume dan Puskesmas Dama yang telah direncanakan untuk di akreditasi sejak 2020, sudah dilakukan Workshop akreditasi puskesmas dan pendampingan

akreditasi oleh Tim Pendamping akreditasi Puskesmas, tetapi karena situasi pandemic Corona 19 sehingga tim surveyor pusat tidak melakukan penilaian terhadap lima puskesmas tersebut, sehingga tidak ada puskesmas yang terakreditasi di Tahun 2021. Maka Jumlah Puskesmas di Kabupaten. Halmahera Utara yang terakreditasi tetap sebanyak 14 Puskesmas dari 19 Puskesmas yang berada di Kabupaten Halmahera Utara. Di harapkan Tahun 2023 penilaian terhadap 5 (Lima) puskesmas ini akan terlaksana karena sudah masuk dalam Rencana Anggaran Tahun 2023 yang bersumber dari DAK Non Fisik

B. Analisa Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Dinas Kesehatan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan, didukung dengan program-program sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pagu anggaran untuk program tersebut diatas sebesar Rp. 26.197.743.718 dan terealisasi sebesar Rp. 16.500.939.988 atau 63%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar 100% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 63% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar (134,24%) dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien.**

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pagu anggaran untuk program tersebut diatas sebesar Rp. 38.181.376.200 dan terealisasi sebesar Rp. 24.466.715.345 atau 64%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar 100% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 64% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar (104,04%) dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien.**

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pagu anggaran untuk program tersebut diatas sebesar Rp. 9.023.591.104 dan terealisasi sebesar Rp. 5.172.256.066 atau 57%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar 100% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 57% diperoleh nilai efisiensi

pencapaian sebesar (166,17%) dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pagu anggaran untuk program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar Rp. 593.484.000 dan terealisasi sebesar Rp. 118.630.000 atau 20% sedangkan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pagu anggarannya yaitu sebesar Rp. 177.085.000 dan terealisasi sebesar Rp. 135.640.000 atau 77%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar 100% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 48,29% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar (207,24%) dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pagu anggaran untuk program tersebut diatas sebesar Rp. 35.464.508.678 dan terealisasi sebesar Rp. 22.800.775.611 atau 64%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar 100% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 64% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar (155,54%) dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis II:



Sasaran strategis ini diukur dengan 1 indikator yang diusung Hasil pengukuran menunjukan 1 indikator ini memiliki capaian kinerja **Baik** dengan persentase **87%**.

A. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Nilai Sakip Pemda merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dan OPD terhadap implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemda dan pada masing-masing OPD. Cakupan/ruang lingkup implementasi SAKIP

yang dievaluasi adalah:

- Perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- Penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2021 adalah sebesar 68,01 dengan kategori B, mengalami penurunan dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya.

B. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Dinas Kesehatan untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan, didukung dengan program sebagai berikut :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran untuk program tersebut diatas sebesar Rp. 44.553.553.357 dan terealisasi sebesar Rp. 42.316.538.138 atau 87%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar 87% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 95% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar 91,88% dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Efisien**.

TABEL T-C 30.a
PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALIASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase ibu hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu hamil	√		100	100	100	100	96	100	100	100	Capaian SPM ini belum mencapai target, Pengetahuan ibu hamil masih rendah dan Sebagian Bidan belum mendapat pelatihan ANC
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan Persalinan	√		100	100	100	100	88	100	100	100	Capaian SPM ini belum mencapai target, Pengetahuan ibu hamil masih rendah dan Sebagian Bidan belum mendapat pelatihan ANC
3	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	√		100	100	100	100	96	100	100	100	Capaian SPM ini belum mencapai target, Pengetahuan ibu hamil masih rendah dan Sebagian Bidan belum mendapat pelatihan ANC

4	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	√		100	100	100	100	93	100	100	100	Capaian SPM ini belum mencapai target, kurangnya partisipasi dari masyarakat dan kurangnya keterlibatan lintas sektor
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar	√		100	100	100	100	96	100	100	100	Capaian SPM belum mencapai target, kurangnya dukungan dari orang tua
6	Persentase orang usia 15-19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√		100	100	100	100	76	100	100	100	Capaian SPM belum mencapai target, keterlambatan distribusi logistik
7	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	√		100	100	100	100	91	100	100	100	Capaian SPM belum mencapai target, keterlambatan distribusi logistik
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√		100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√		100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	√		100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	√		100	100	100	100	74	100	100	100	Capaian SPM belum mencapai target, keterlambatan distribusi logistik
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	√		100	100	100	100	74	100	100	100	Capaian SPM belum mencapai target, keterlambatan distribusi logistik

Indikator SPM bidang Kesehatan terdiri dari 12 indikator yang merupakan capaian antara (output) dalam mencapai tujuan Pembangunan Kesehatan. Target dari masing-masing indikator adalah 100%, hal ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Daerah. Pengukuran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan proses sistematika untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam menyelidikan pelayanan dasar yang bermuarah pada kesejahteraan rakyat. Hasil pencapaian SPM sesuai table T-C. 30.b diatas dapat dikelompokan dalam 2 bagian yaitu:

1. Indikator Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM), Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, capaian SPM ini telah mencapai target yang didukung dengan standar kualitas ketersediaan logistic terpenuhi.
2. Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV, Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga TBC, capaian SPM ini belum mencapai target, pengetahuan ibu hamil masih rendah, keterlambatan pengiriman logistic, kurangnya dukungan orang tua dan Sebagian bidan belum mendapat pelatihan ANC.

.2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Isu-isu strategis yang terkait dengan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara didasarkan pada dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara. Isu-isu strategis ini merupakan kondisi, kejadian atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih esar, atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memiliki dampak jangka Panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan Pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara sampai pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan itu sendiri, Tercapainya beberapa target pada indikator kunci yang ditetapkan memang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan. Namun berbagai capaian yang sudah diperoleh, tentunya bukan suatu hal yang membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara harus berpuas diri tetapi harus tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan yang ada.

A. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD

Permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi pelayanan Dinas kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara untuk lima tahun kedepan, sebagai berikut :

- 1) Masih terjadi Kematian Ibu
- 2) Masih terjadi Kematian Bayi
- 3) Masih ada Balita Underweight, Stunting dan Wasting di beberapa Kecamatan Masih tinggi
- 4) Jumlah, sebaran dan kualitas tenaga kesehatan belum merata di wilayah kab. Halmahera utara
- 5) Meningkatnya Angka Kesakitan dan Kematian akibat Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
- 6) Peningkatan Pelayanan kesehatan seluruh Fasilitas Kesehatan yang belum sesuai standar
- 7) Masih tingginya resiko pencemaran terhadap sarana air bersih (sumur gali)
- 8) Masih kurang Jamban yang memenuhi syarat
- 9) Peningkatan Pelayanan kesehatan seluruh Fasilitas Kesehatan yang belum sesuai standar

B. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan**1. Tantangan**

Tantangan Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Dalam rangka pencapaian indikator, beberapa tantangan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara:

- Rendahnya status kesehatan masyarakat (Masalah KIA,Gizi,PM.PTM)
- Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman
- Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (Sarana dan prasarana)
- Terbatasnya tenaga kesehatan (kuantitas dan kualitas) dan distribusi tidak merata
- Rendahnya pembiayaan kesehatan (anggaran kesehatan Dinkes Kabupaten Halmahera Utara 10% APBD sudah termasuk gaji
- Kerja sama lintas sektor (Dinas PU, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas BP3KB) belum berjalan dengan baik
- Sistem Informasi Kesehatan Belum dilaksanakan termasuk jaringan komunikasi yang belum memadai

- Adanya daerah terpencil dan kepulauan

2. Peluang

Peluang adalah semua yang terkait dengan penyelesaian permasalahan baik secara internal maupun eksternal.

a) Peluang secara internal disebut kekuatan antara lain :

- Adanya regulasi dalam mendukung program Kesehatan
- Struktur organisasi dan kelembagaan sudah terbentuk sampai tingkat puskesmas
- Adanya koordinasi dan komitmen dengan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten dalam pembangunan kesehatan
- Adanya dukungan lintas sektor
- Tersediannya sarana dan prasarana kesehatan sampai tingkat kecamatan
- Adanya peningkatan jumlah dan kualitas SDM kesehatan

b) Peluang eksternal yang mendukung pembangunan kesehatan adalah :

- Tingkat pendidikan masyarakat yang makin tinggi;
- Makin meningkatnya pendapatan perkapita penduduk dan menurunnya presentase penduduk miskin;
- Komunikasi, informasi dan transportasi yang makin baik mempercepat pencapaian pemerataan pelayanan kesehatan;
- Adanya peran serta perguruan tinggi, LSM, organisasi profesi dan swasta dalam pengorganisasian dan penggerakan kegiatan kesehatan.

C. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari analisis Pembangunan dan masalah Pembangunan Kesehatan dan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara dalam Pembangunan Kesehatan serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan adalah:

1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi
2. Percepatan penurunan stunting dan wasting pada balita
3. Pembangunan Rumah Sakit Tipe B
4. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
5. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan secara merata
6. Peningkatan kompetensi serta pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan
7. Pembudayaan perilaku hidup sehat
8. Peningkatan efektifitas jaminan Kesehatan

9. Puskesmas Ramah Anak

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berupa rancangan awal RKPD. Review ini sangat diperlukan untuk mendapatkan formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat.

Pada rancangan awal RKPD belum memuat pembangunan Baru Rumah Sakit, namun Berdasarkan hasil analisa kebutuhan bahwa perlu adanya pembangunan Rumah Sakit Umum Tipe B untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2021 dan Permenkes No 26 Tahun 2021 tentang pedoman Ina-CBGs, kesehatan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2023 akan diberlakukan kebijakan kelas standar bagi peserta BPJS kesehatan maka Rumah sakit perlu telaah untuk mengantisipasi kecenderungan kebutuhan pelayanan di masa mendatang. Dimana pada tahun 2022 sudah ada Master plan dan Feasibility study RS Tipe B dan pada Tahun 2023 sudah dianggarkan biaya untuk Detail Engginering Detail (DED) RS Tipe B.

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan dapat diuraikan dalam Tabel 2.3 Tabel Review Terhadap Rancangan Awal PD (Terlampir)

TABEL T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

OPD : DINAS
KESEHATAN
KABUPATEN
HALMAHERA UTARA

PERANGKAT DAERAH :
DINAS KESEHATAN

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Tingkat capaian kinerja sasaran perangkat daerah (persen)	100%	42.663.446.662	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Tingkat capaian kinerja sasaran perangkat daerah (persen)	100%	42.663.446.662
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Persentase konsistensi Dokumen renja terhadap resntra (persen)	100%	75.873.274	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Persentase konsistensi Dokumen renja terhadap resntra (persen)	100%	75.873.274
						Dinkes	Persentase konsistensi Dokumen renja terhadap RKPD (persen)	100%			Dinkes	Persentase konsistensi Dokumen renja terhadap RKPD (persen)	100%	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen Rerencanaan PD	1 Dokumen	56.353.324	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen Rerencanaan PD	1 Dokumen	56.353.324

1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.110.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.110.000
2	02	01	1.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.110.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.110.000
3	02	01	1.03	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	1 Dokumen	2.110.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	1 Dokumen	2.110.000

4	02	01	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	1 Dokumen	2.110.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	1 Dokumen	2.110.000
5	02	01	1.05	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinkes	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.789.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinkes	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.789.950
6	02	01	1.06	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.290.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.290.000

1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinkes	Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)	100%	40.609.419.700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinkes	Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)	100%	40.609.419.700
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12.504 Orang/Bulan	40.591.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12.504 Orang/Bulan	40.591.000.000
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinkes	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	18.419.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinkes	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	18.419.700

1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dinkes	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam Simda BMD	100%	25.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dinkes	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam Simda BMD	100%	25.000.000	
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Dinkes	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Dinkes	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000	
1	02	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinkes	Persentase Realisasi kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	479.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinkes	Persentase Realisasi kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	479.500.000	
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Dinkes	Jumlah Paket	1 Paket	79.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas	Dinkes	Jumlah Paket	1 Paket	79.500.000	

					Kelengkapannya		Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Beserta Atribut Kelengkapannya		Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinkes	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinkes	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000
1	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19 Orang	350.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19 Orang	350.000.000
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinkes	Persentase realisasi kinerja adminitarsi umum perangkat daerah	100%	633.823.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinkes	Persentase realisasi kinerja adminitarsi umum perangkat daerah	100%	633.823.000
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik /Peneranga	1 Paket	2.723.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik /Peneranga	1 Paket	2.723.000

							n Bangunan Kantor yang di sediakan					n Bangunan Kantor yang di sediakan		
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinkes	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinkes	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.500.000
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinkes	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinkes	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.600.000
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinkes	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	42.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinkes	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	42.000.000

1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	440.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	440.000.000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Persentase realisasi kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	424.626.688	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Persentase realisasi kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	424.626.688
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	153.842.594	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	153.842.594
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	145.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	145.400.000

							yang disediakan					yang disediakan		
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	9.950.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	9.950.000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	115.434.094	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	115.434.094
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	415.204.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	415.204.000
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkes	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	115.204.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Dinkes	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	115.204.000

							yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Persentase rata-rata pemenuhan 12 jenis SPM Bidang Kesehatan	92%	80.322.646.233	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Persentase rata-rata pemenuhan 12 jenis SPM Bidang Kesehatan	92%	92.022.646.233
						Dinkes	Persentase Puskesmas terakreditasi	84%			Dinkes	Persentase Puskesmas terakreditasi	84%	
						Dinkes	Cakupan Desa Universal Child Immunization (Persen)	75%			Dinkes	Cakupan Desa Universal Child Immunization (Persen)	75%	

1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah dan Kabupaten Kota	Dinkes	Persentase rata-rata ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terstandar	82%	18.774.731.991	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah dan Kabupaten Kota	Dinkes	Persentase rata-rata ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terstandar	82%	30.474.731.991
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Tobelo Tengah	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio Tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	1 Unit		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Tobelo Tengah	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio Tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	1 Unit	10.000.000.000
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Puskesmas DUM_DUM	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	3.500.000.000	Pembangunan Puskesmas	Puskesmas DUM_DUM	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	3.500.000.000
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rumah Dinas Paramedis Supu, Rumdis Paramedis	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	1 Unit	600.000.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rumah Dinas Paramedis Supu, Rumdis Paramedis	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	3 Unit	1.800.000.000

						dis DUM- DUM					is Para medis DUM- DUM			
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Puskesmas PITU	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1 Unit	500.000.000	Pengembangan Puskesmas	Puskesmas PITU	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1 Unit	500.000.000
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Puskesmas Galela	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	1 Unit	600.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Puskesmas Galela	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	1 Unit	600.000.000
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pustu Ruko, Kalipitu, Birin	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi	3 Unit	1.500.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pustu Ruko, Kalipitu, Birin	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi	3 Unit	1.500.000.000

							dan pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya					dan pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rumah Dinas Paramedis Dorume	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1 Unit	500.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rumah Dinas Paramedis Dorume	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1 Unit	500.000.000
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19 Puskesmas	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	16 Unit	2.575.000.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19 Puskesmas	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	16 Unit	2.575.000.000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19 Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	19 Paket	3.555.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19 Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	19 Paket	3.555.000.000

1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat dan Vaksin	Dinkes	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	1 Paket	4.000.000.000	Pengadaan Obat dan Vaksin	Dinkes	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	1 Paket	4.000.000.000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	19 Puskesmas	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	1 Paket	1.225.731.991	Pengadaan Bahan Habis Pakai	19 Puskesmas	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	1 Paket	1.225.731.991
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	19 Puskesmas	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	219.000.000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	19 Puskesmas	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	219.000.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19 Puskesmas	Presentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI	75%	61.297.914.242	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	19 Puskesmas	Presentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI	75%	61.297.914.242

							Eksklusif			Kabupaten/Kota		Eksklusif		
						19 Puskes mas	Presntase Desa STBM	35%			19 Pusk esma s	Presntase Desa STBM	35%	
						19 Puskes mas	Angka Prevalensi Malaria	0.5/1000 pddk			19 Pusk esma s	Angka Prevalensi Malaria	0.5/1000 pddk	
						19 Puskes mas	Persentase ibu hamil mendapatk an Pelayanan Kesehatan ibu hamil	100%			19 Pusk esma s	Persentase ibu hamil mendapatk an Pelayanan Kesehatan ibu hamil	100%	
						19 Puskes mas	Persentase ibu bersalin mendapatk an Pelayanan Kesehatan Persalinan	100%			19 Pusk esma s	Persentase ibu bersalin mendapatk an Pelayanan Kesehatan Persalinan	100%	
						19 Puskes mas	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatk an Pelayanan Kesehatan bayi baru	100%			19 Pusk esma s	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatk an Pelayanan Kesehatan bayi baru	100%	

							lahir					lahir		
						19 Puskes mas	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100%			19 Pusk esma s	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100%	
						19 Puskes mas	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatk an Pelayanan sesuai standar	100%			19 Pusk esma s	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatk an Pelayanan sesuai standar	100%	
						19 Puskes mas	Persentase orang usia 15-19 tahun mendapatk an skrining kesehatan sesuai standar	100%			19 Pusk esma s	Persentase orang usia 15-19 tahun mendapatk an skrining kesehatan sesuai standar	100%	
						19 Puskes mas	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatk an skrining kesehatan	100%			19 Pusk esma s	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatk an skrining kesehatan	100%	

							sesuai standard					sesuai standard		
						19 Puskes mas	Persentase penderita hipertensi yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			19 Pusk esma s	Persentase penderita hipertensi yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
						19 Puskes mas	Persentase penderita DM yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			19 Pusk esma s	Persentase penderita DM yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
						19 Puskes mas	Persentase ODGJ Berat yang mendapatk an pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%			19 Pusk esma s	Persentase ODGJ Berat yang mendapatk an pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
						19 Puskes mas	Persentase orang Terduga TBC mendapatk	100%			19 Pusk esma s	Persentase orang Terduga TBC mendapatk	100%	

							an Pelayanan TBC sesuai standar					an Pelayanan TBC sesuai standar		
						19 Puskes mas	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatk an Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%			19 Pusk esma s	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatk an Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19 Puskes mas	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	3718 Orang	1.148.430.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19 Puske smas	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	3718 Orang	1.148.430.000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	19 Puskes mas	Jumlah ibu bersalin mendapatk an pelayanan persalinan	3422 Orang	981.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	19 Puske smas	Jumlah ibu bersalin mendapatk an pelayanan persalinan	3422 Orang	981.000.000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	19 Puskes mas	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatk an Pelayanan Kesehatan	3259 Orang	149.820.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	19 Puske smas	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatk an Pelayanan Kesehatan	3259 Orang	149.820.000

							Bayi Baru Lahir sesuai standar					Bayi Baru Lahir sesuai standar		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19 Puskes mas	jumlah balita yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar	19.275 Orang	512.870.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19 Puske smas	jumlah balita yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar	19.275 Orang	512.870.000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19 Puskes mas	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatk an Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pendidikan Dasar	11.281 Orang	408.900.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19 Puske smas	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatk an Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pendidikan Dasar	11.281 Orang	408.900.000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19 Puskes mas	Jumlah Penduduk usia produktif yang mendapatk an skrining kesehatan sesuai standar	146.200 Orang	579.840.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19 Puske smas	Jumlah Penduduk usia produktif yang mendapatk an skrining kesehatan sesuai standar	146.200 Orang	579.840.000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada	19 Puskes mas	Jumlah penduduk usia lanjut	11.032 Orang	1.146.055.160	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada	19 Puske smas	Jumlah penduduk usia lanjut	11.032 Orang	1.146.055.160

					Usia Lanjut		yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standard Lanjut			Usia Lanjut		yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standard Lanjut		
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19 Puskesmas	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatk an Pelayanan Kesehatan sesuai standar	3397 Orang	199.996.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19 Puskesmas	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatk an Pelayanan Kesehatan sesuai standar	3397 Orang	199.996.000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	19 Puskesmas	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatk an Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1012 Orang	199.996.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	19 Puskesmas	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatk an Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1012 Orang	199.996.000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	19 Puskesmas	Jumlah Orang yang mendapatk an pelayanan Kesehatan Orang	13 Orang	126.140.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	19 Puskesmas	Jumlah Orang yang mendapatk an pelayanan Kesehatan Orang	13 Orang	126.140.000

							Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar					Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	19 Puskesmas	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	566 Orang	446.726.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	19 Puskesmas	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	566 Orang	446.726.000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan resiko Terinfeksi HIV	19 Puskesmas	Jumlah Orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	6300 Orang	446.726.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan resiko Terinfeksi HIV	19 Puskesmas	Jumlah Orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	6300 Orang	446.726.000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	585.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	585.000.000

1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olaraga	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olaraga	1 Dokumen	126.140.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olaraga	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olaraga	1 Dokumen	126.140.000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	493.460.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	493.460.000
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	1 Dokumen	126.140.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	1 Dokumen	126.140.000
1	02	02	2.02	20	Pelayanan Surveilans Kesehatan	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Surveilans	1 Dokumen	200.000.000	Pelayanan Surveilans Kesehatan	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Surveilans	1 Dokumen	200.000.000

							Kesehatan					Kesehatan		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	5.288.539.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	5.288.539.000
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3 Dokumen	17.159.440.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3 Dokumen	17.159.440.000
1	02	02	2.02	30	Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas Pelayanan	'PKM Supu, Bobanigo, Malifut	Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi Jarak jauh antar Fasyankes melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk mendapatkan Akses Pelayanan	3 Unit	500.000.000	Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas Pelayanan	'PKM Supu, Bobanigo, Malifut	Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi Jarak jauh antar Fasyankes melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk mendapatkan Akses Pelayanan	3 Unit	500.000.000

							Kesehatan yang Berkualitas					Kesehatan yang Berkualitas		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	21 Dokumen	13.145.050.009	Operasional Pelayanan Puskesmas	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	21 Dokumen	13.145.050.009
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	19 Dokumen	14.959.316.073	Operasional Pelayanan Puskesmas	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	19 Dokumen	14.959.316.073
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Klinik Pratama Kao	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1.500.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Klinik Pratama Kao	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1.500.000.000
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	Puskesmas Bobanigo, Dum-Dum, Supu, Dorume dan Dama	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten Kota	5 Unit	768.330.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	Puskesmas Bobanigo, Dum-Dum, Supu, Dorume dan Dama	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten Kota	5 Unit	768.330.000

1	02	02	2.02	35	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tobelo	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam satu sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	100.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tobel o	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam satu sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	100.000.000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Dinkes	Presentase Puskesmas yang memiliki Sitem Informasi Kesehatan	32%	250.000.000	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan	Dinke s	Presentase Puskesmas yang memiliki Sitem Informasi Kesehatan	32%	250.000.000
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Data dan Informasi Kesehaatn	1 Dokume n	250.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinke s	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Data dan Informasi Kesehaatn	1 Dokumen	250.000.000
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Dinkes	Rasio Dokter per satuan penduduk	0,79	5.075.968.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Dinke s	Rasio Dokter per satuan penduduk	0,79	5.075.968.000

					Kesehatan		(per 2500 penduduk)			Manusia Kesehatan		(per 2500 penduduk)		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di wilayah Kab/Kota	Dinkes	Persentase desa yang memiliki Tenaga Kesehatan	80%	4.446.000.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di wilayah Kab/Kota	Dinkes	Persentase desa yang memiliki Tenaga Kesehatan	80%	4.446.000.000
						Dinkes	Rasio Bidan per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	2,47			Dinkes	Rasio Bidan per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	2,47	
						Dinkes	Rasio Perawat per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	2,27			Dinkes	Rasio Perawat per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	2,27	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	19 Puskesmas, Dinkes	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	76 OK	4.446.000.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	19 Puskesmas, Dinkes	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	76 OK	4.446.000.000

1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Presentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti diklat kompetensi	65%	629.968.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Presentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti diklat kompetensi	65%	629.968.000
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	JUmlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan mutu dan kompetensinya Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 Orang	629.968.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	JUmlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan mutu dan kompetensinya Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 Orang	629.968.000
1	02	04			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinkes	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar	85%	518.000.000	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinkes	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar	85%	518.000.000

							dan persyarata n Perizinan					dan persyarata n Perizinan		
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes	Persentase peningkata n Jumlah P-IRT yang memiliki Sertifikat	40%	439.000.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinke s	Persentase peningkata n Jumlah P-IRT yang memiliki Sertifikat	40%	439.000.000
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengendali an dan Pengawasa n serta Tindak Lanjut Pengawasa n Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan	1 Dokume n	439.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang	Dinke s	Jumlah Dokumen Hasil Pengendali an dan Pengawasa n serta Tindak Lanjut Pengawasa n Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan	1 Dokumen	439.000.000

							Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga	17 Kecamatan	Persentase P-IRT yang dimonitoring	79%	79.000.000	Pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga	17 Kecamatan	Persentase P-IRT yang dimonitoring	79%	79.000.000
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	17 Kecamatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang	60 Unit	79.000.000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	17 Kecamatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang	60 Unit	79.000.000

						beredar yang dilakukan Pemeriksaan <i>Post market</i> dalam rangka tindak lanjut pengawasan					beredar yang dilakukan Pemeriksaan <i>Post market</i> dalam rangka tindak lanjut pengawasan			
1	02	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	19 Puskesmas	Persentase Posyandu Aktif	72%	405.728.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	19 Puskesmas	Persentase Posyandu Aktif	72%	405.728.000
						19 Puskesmas	Rasio jumlah posbindu PTM terhadap jumlah Desa	90%			19 Puskesmas	Rasio jumlah posbindu PTM terhadap jumlah Desa	90%	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19 Puskesmas	Persentase Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Germas	80%	239.588.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19 Puskesmas	Persentase Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Germas	80%	239.588.000
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,	2 Dokumen	239.588.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,	19 Puskesmas	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,	2 Dokumen	239.588.000

					Masyarakat		Advokasi, Kemitraan dan Pemberday aan Masyarakat			Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Advokasi, Kemitraan dan Pemberday aan Masyarakat		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota	19 Puskes mas	Persentase puskesmas yang melakukan Pelayanan Promotif dan Preventif pada desa binaan	80%	166.140.000	Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota	19 Pusk esmas s	Persentase puskesmas yang melakukan Pelayanan Promotif dan Preventif pada desa binaan	80%	166.140.000
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	19 Puskes mas	Jumlah DokumenH asil Penyelengg araan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	2 Dokume n	166.140.000,00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	19 Puske smas	Jumlah DokumenH asil Penyelengg araan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	2 Dokumen	166.140.000,00
JUMLAH									128.985.788.89 5					140.685.788.89 5

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 terjadi perubahan alokasi anggaran, dimana anggaran pada rancangan awal sebesar Rp. 128.985.788.895,- menjadi 140.685.788.895,- naik sebesar 1%. Adapun program yang mengalami perubahan anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan alokasi Rp. 80.322.646.233 menjadi 92.022.646.233 bertambah sebesar 1,14%.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 diambil dari proses bottom up planning dan top down planning dengan mengacu kepada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026. Pada proses bottom up planning, lebih diarahkan pada penampungan kebutuhan seluruh lintas sektor kecamatan dan mitra kerja seluruh perangkat daerah sedangkan pada proses top downnya bersumber dari pemaknaan kebijakan nasional, komitmen Kepala Daerah serta analisis situasi yang dipandang perlu oleh pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara. Hal yang menjadi perhatian dalam rencana kerja adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin dengan makin berbasis teknologi berkualifikasi layanan seperti perbankan, sehingga masyarakat mendapat kenyamanan dalam menerima pelayanan. untuk itu kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan sumberdaya yang makin terstandarisasi, sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan 2023 tercantum dalam tabel berikut:

TABEL TC. 32
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024
MUSYAWARAH PERENCANAAN (MUSREMBANG) KECAMATAN DAN POKOK PIKIRAN DPRD
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Presentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Pukesmas		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Pukesmas		
1	Pembangunan Puskesmas	Soakonora	Bangun Baru Berdasarkan Permenkes 75	1 Paket	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
2	Pengembangan Puskesmas	Kupa-Kupa	Penambahan ruang Gudang Obat	1 Unit	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Soakonora	Penambahan Ruang Poli Gigi, Ruang Tindakan	2 Unit	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Daru	Penambahan Ruang Tindakan	1 Unit	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Mawea	Penambahan Ruang Pelayanan (Ruang Gawat Darurat, Ruang Poli Gigi, Ruang persalinan, Ruang p2p dan Gudang), Pembuatan Pagar Puskesmas dan Tempat Parkir Ambulance dan Penataan Halaman PKM (Tergenang Air)	7 unit	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Dorume	Pembangunan Pagar Puskesmas	200 m	Sudah di anggarkan di Tahun 2023
3	Pembanguna Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dorume	Pembanguna Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	2 Unit	Sudah di anggarkan Rehab di Tahun 2023
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Galela	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1 Unit	Diusulkan Tahun Anggaran 2024
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Igobula	Pembuatan Pagar Pustu	1 Paket	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Kokota jaya (Tobelo Utara)/ Pustu Ruko	Rehab PUSTU	1 paket	Diusulkan Tahun Anggaran 2024
		Katana	Rehab Poskesdes	1 paket	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Gonga	Rehab Polindes	1 Unit	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Kali Pitu	Rehab PUSTU	1 Paket	Diusulkan Tahun Anggaran 2024
		Jere	Rehab PUSTU/Polindes	1 Paket	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Pediwang	Rehab PUSTU	1 Paket	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Pocao	Rehab PUSTU	1 Paket	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Dedeta	Rehab PUSTU	1 Paket	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran

		Dagasuli	Rehab POLINDES	1 Paket	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Doitia	Rehab POLINDES	1 Paket	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Birinoa	Rehab POLINDES	1 Paket	Diusulkan Tahun Anggaran 2024
		Sukamaju dan Wangongira	Rehab POLINDES	3 paket	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kupa-Kupa	Rehab Rumah Dokter dan Para medis	2 Unit	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Mawea	Rehab Rumah Dokter dan Para medis	4 Unit	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
7	Pengadaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Galela	Pengadaan IPAL	1 Unit	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Soakonora	Pengadaan Ambulance	1 Unit	Diusulkan Tahun Anggaran 2024
		Dorume	Pengadaan Ambulance	1 Unit	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Daru dan Desa Dowongimaiti	Pengadaan Ambulance	2 Unit	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		malifut	Alat Foging	2 paket	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
		Meti	Mebeulair Pustu	1 paket	Menyesuaikan dengan Pagu Anggaran
8	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Gonga	Alkes Pustu	1 paket	
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di wilayah Kab/Kota				
9	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	Soakonora	Tenaga Dokter Gigi	1 Orang	Diusulkan Tahun Anggaran 2024

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan Nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Arah kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional berdasarkan RPJMN 2020 – 2024 yaitu :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat melalui GERMAS
5. Penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif di dukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025.

Arah Kebijakan RPJMD 2020-2024 Propinsi Maluku Utara, meliputi :

1. Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak
2. Percepatan dan penanganan stunting dan wasting pada balita
3. Peningkatan efektivitas pengendalian penyakit
4. Peningkatan akses mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
5. Pemenuhan dan Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
6. Peningkatan sediaan obat dan perbekalan kesehatan
7. Peningkatan efektivitas jaminan kesehatan
8. Peningkatan budaya hidup sehat
9. Peningkatan kualitas pelayanan penunjang fungsi pemerintahan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Dinas Kesehatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2021-2026 Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara harus mampu menjawab setiap tantangan dan mengadaptasi peluang yang ada untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pada pelayanan Dinas Kesehatan Termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorongnya untuk setiap program terkait yang mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Utara.

Visi dan Misi Bupati Halmahera Utara adalah

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan”

Makna yang terkandung dalam Visi ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

Kesejahteraan Masyarakat: kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Dalam pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat ialah kondisi di mana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.

Pembangunan Berkelanjutan: merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Inovasi: pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi namun secara umum inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Investasi: Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Ada 4 (empat) Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.

Dari keempat misi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi I yaitu: ***“Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan social bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah”*** dalam mewujudkan Tujuan Daerah ke 1 yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter” dengan indikator kinerjanya *“Indeks Pembangunan Manusia”* serta Sasaran Daerah ke 1 yaitu “Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat” dengan indikator kinerja *“Indeks Kesehatan Daerah ”*. Sasaran Daerah ke 1 ini yang kemudian dijabarkan/diturunkan (*cascade*) ke Sasaran Strategis Dinas Kesehatan (*Sub Sasaran 1*) yaitu “Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan” yang kemudian diukur dengan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan yaitu *“Angka Kematian Ibu”, “Angka Kematian Neonatal”, “Prevalensi Stunting/Wasting pada Balita” Rasio Daya Tampung Rumah Sakit”* dan *“Rasio Puskesmas Terakreditasi ”*.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan untuk jangka menengah (2021-2026) dijabarkan dan diarahkan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

a. Tujuan

Mewujudkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan Kesehatan.

Indikator Tujuan : Persentase Keluarga Sehat

b. Sasaran 1

Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan Kesehatan.

Indikator Sasaran :

1. Angka Kematian ibu (AKI) per 100,000 Kelahiran Hidup
2. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

3. Prevalensi Stunting pada Balita (Persen)
4. Prevalensi Wasting pada Balita (Persen)
5. Rasio Puskesmas Terakreditasi terhadap jumlah penduduk (Per 16ribu penduduk)

c. Sasaran 2

Meningkatnya kualitas tata Kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator Sasaran :

1. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan dapat dilihat dalam Tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				I	II	III	IV	V	VI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan Kesehatan		Persentase Keluarga Sehat	25	30	35	40	45	50
		Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan Kesehatan	Angka Kematian ibu (AKI) per 100,000 Kelahiran Hidup	107,5	104	100,5	97	93,5	90
			Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	6	6	6	6	6	6
			Prevalensi Stunting pada Balita (Persen)	19,12	18,09	17,07	16,05	15,02	14
			Prevalensi Wasting pada Balita (Persen)	8,28	7,62	6,97	6,31	5,66	5
			Rasio Puskesmas terakreditasi terhadap jumlah penduduk (per 16ribu penduduk)	1,17	1,21	1,25	1,29	1,33	1,37
			Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk (per 1000 penduduk)	1,08	1,1	1,13	1,16	1,18	1,21
		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75	80	80	85	85	85

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Target Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari MDGs, terdapat 4 (empat) target SDGs yang berhubungan dengan kesehatan

- Tujuan 2 : Mengakhiri Kelaparan
- Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua di segala usia (SKN)
- Tujuan 4 : Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan (akses kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana)
- Tujuan 5 : Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang (sanitasi dan air bersih)

2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan menjadi salah satu program prioritas yang harus di laksanakan Dinas Kesehatan. Adapun program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara ditujukan untuk meningkatkan capaian indicator SPM terhadap target yang telah di tetapkan.

3. Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi penduduk miskin

Penanggulangan kemiskinan melalui program UHC (Universal Health Coverage) untuk setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif fan rehabilitatif.

Rumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, strategi dan arah kebijakan.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 terdiri dari 5 Program dan 16 Kegiatan 67 Sub Kegiatan yang masih dapat berubah disesuaikan dengan kondisi dan hasil evaluasi pelaksanaan Tahun 2022 dan prediksi capaian Tahun 2023. Lokasi kegiatan tersebar di 19 Puskesmas dengan pagu indikatif sebesar Rp. 128.985.788.895) yang bersumber dari APBD (DAU dan DAK) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2024. Termasuk biaya Kapitasi JKN Puskesmas sebesar (14.959.316.073).

c. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indicator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara menetapkan program dan kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur untuk mengakomodir sebanyak 19 (Sembilan Belas) unit Pelaksana Teknis Daerah (19 Puskesmas), 4 Bidang dan Sekretariat Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA – SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koodinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koodinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6). Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 1). Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah dan Kabupaten Kota
- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 - Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Obat dan Vaksin
 - Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai
 - Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 2). Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan resiko Terinfeksi HIV
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya
 - Sub Kegiatan Pelayanan Surveilans Kesehatan
 - Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - Sub Kegiatan Penyediaan *Telemedicine* di Fasilitas Pelayanan
 - Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas
 - Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas
 - Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 3). Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan
- Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 1).Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di wilayah Kab/Kota
 - Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
- 2).Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - 1). Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - 1) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2).Kegiatan Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rencana Kerja program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Tabel IV.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARG ET KINE RJA	PAGU ANGGARAN	PRIO RITA S
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah (persen)	100%	42.663.446.662	3
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase rata- rata pemenuhan 12 jenis SPM Bidang Kesehatan	92%	80.322.646.233	1
		Persentase Puskesmas terakreditasi	84%		
		Cakupan Desa Universal Child Immunization (Persen)	&5%		

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGE T KINER JA	PAGU ANGGRAN	PRI ORI TAS
1	2	3	4	5	6
		persentase penambahan jumlah tempat tidur RSUD	6,4		
		Jumlah Layanan RSUD yang tersertifikasi ISO (Kumulatif)	1		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter per satuan penduduk (per 2500 penduduk)	0,79	5.075.968.000	1
		Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk (per 16ribu penduduk)	1.30		
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat),Usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan Industri rumah Tangga yang memenuhi standar dan persyaratan Perizinan	72%	518.000.000	2
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	81,1	405.728.000	2
		Rasio jumlah posbindu PTM terhadap jumlah Desa	92,4		
TOTAL PAGU ANGGARAN				128.985.788.895	

Rencana anggaran untuk program dan kegiatan pada tahun 2024 untuk melaksanakan 1 program generik dan 4 program teknis yang dijabarkan kedalam 11 kegiatan untuk mencapai 5 indikator sasaran yang ditetapkan. Untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan belanja langsung dan tidak langsung didukung dengan dana sebesar Rp.128.985.788.895,- melalui pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

Tabel TC 33-1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

OPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Kode rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
										APBD II	APBD I	APBN				APBD II	APBD I	APBN
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
1	02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja sasaran perangkat daerah (persen)	Dinkes	100%	42,663,446,662			DAU		100%	42,663,446,617		
1	02	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi Dokumen renja terhadap resntra (persen)	Dinkes	100%	75,873,274			DAU		100%	75,873,274		
							Persentase konsistensi Dokumen renja terhadap RKPD (persen)	Dinkes	100%						100%			
1	02	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rerencanaan PD	Dinkes	1 Dokumen	56,353,324			DAU		1 Dokumen	56,353,324		
1	02	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dinkes	1 Dokumen	2,110,000			DAU		1 Dokumen	2,110,000		
2	02	01	1.02	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Dinkes	1 Dokumen	2,110,000			DAU		1 Dokumen	2,110,000		
3	02	01	1.03	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	Dinkes	1 Dokumen	2,110,000			DAU		1 Dokumen	2,110,000		
4	02	01	1.04	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-	Dinkes	1 Dokumen	2,110,000			DAU		1 Dokumen	2,110,000		
5	02	01	1.05	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Dinkes	1 Laporan	7,789,950			DAU		1 Laporan	7,789,950		

6	02	01	1.06	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	1 Laporan	3,290,000		DAU	1 Laporan	3,290,000		
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)	Dinkes	100%	40,609,419,700		DAU	100%	40,609,419,700		
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes	12.504 Orang/B	40,591,000,000		DAU	12.504 Orang/Bu	40,591,000,000		
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi	Dinkes	1 Laporan	18,419,700		DAU	1 Laporan	18,419,700		
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam Simda BMD	Dinkes	100%	25,000,000		DAU	100%	25,000,000		
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinkes	1 Laporan	25,000,000		DAU	1 Laporan	25,000,000		
1	02	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dinkes	100%	479,500,000		DAU	100%	479,500,000		
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinkes	1 Paket	79,500,000		DAU	1 Paket	79,500,000		
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinkes	1 Dokume	50,000,000		DAU	1 Dokume	50,000,000		
1	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes	19 Orang	350,000,000		DAU	19 Orang	350,000,000		
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi kinerja adminitarsi umum perangkat daerah	Dinkes	100%	633,823,000		DAU	100%	633,823,000		
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Dinkes	1 Paket	2,723,000		DAU	1 Paket	2,723,000		
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Dinkes	1 Paket	100,000,000		DAU	1 Paket	100,000,000		
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinkes	1 Paket	40,500,000		DAU	1 Paket	40,500,000		
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinkes	1 Dokume n	8,600,000		DAU	1 Dokume n	8,600,000		
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinkes	1 Laporan	42,000,000		DAU	1 Laporan	42,000,000		

1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	1 Laporan	440,000,000		DAU	1 Laporan	440,000,000		
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	100%	424,626,688		DAU	100%	424,626,643		
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes	1 Laporan	153,842,594		DAU	1 Laporan	153,842,549		
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes	1 Laporan	145,400,000		DAU	1 Laporan	145,400,000		
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Dinkes	1 Laporan	9,950,000		DAU	1 Laporan	9,950,000		
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Dinkes	1 Laporan	115,434,094		DAU	1 Laporan	115,434,094		
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Dinkes	100%	415,204,000		DAU	100%	415,204,000		
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinkes	1 Unit	115,204,000		DAU	1 Unit	115,204,000		
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Dinkes	1 Unit	300,000,000		DAU	1 Unit	300,000,000		
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase rata-rata pemenuhan 12 jenis SPM Bidang Kesehatan	Dinkes	92%	80,322,646,233		DAK /DAU	92%	102,910,688,872		
						Persentase Puskesmas terakreditasi	Dinkes	84%				84%			
						Cakupan Desa Universal Child Immunization (Persen)	Dinkes	75%				75%			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah dan Kabupaten Kota	Persentase rata-rata ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terstandar	Dinkes	82%	18,774,731,991		DAU	82%	31,913,362,987		
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio Tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	Tobelo Tengah	1 Unit			DAU	1 Unit			

1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Puskesmas DUM DUM	1 Unit	3,500,000,000			DAU		1 Unit	4,250,000,000		
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Rumah Dinas Paramedis	1 Unit	600,000,000			DAU		1 Unit	1,200,000,000		
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Puskesmas PITU	1 Unit	500,000,000			DAU		1 Unit	4,000,000,000		
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	Puskesmas Galela	1 Unit	600,000,000			DAU		1 Unit	1,000,000,000		
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pustu Ruko, Kalipitu, Birinoa	3 Unit	1,500,000,000			DAU		3 Unit	2,100,000,000		
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	Rumah Dinas Paramedis	1 Unit	500,000,000			DAU		1 Unit	1,000,000,000		
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	19 Puskesmas	16 Unit	2,575,000,000			DAK/DAU		16 Unit	5,822,587,992		
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	19 Puskesmas	19 Paket	3,555,000,000			DAK/DAU		19 Paket	6,096,043,004		
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	Dinkes	1 Paket	4,000,000,000			DAK/NF/DAU		1 Paket	4,000,000,000		
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	19 Puskesmas	1 Paket	1,225,731,991			DAK/NON FISIK		1 Paket	2,225,731,991		
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medik Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medik Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	19 Puskesmas	1 Paket	219,000,000			DAK/NF/DAU		1 Paket	219,000,000		

1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	19 Puskesmas	75%	61,297,914,242		DAK NF/DAU	75%	70,747,325,885		
					Presntase Desa STBM	19 Puskesmas	35%				35%			
					Angka Prevalensi Malaria	19 Puskesmas	0.5/1000 pddk				0.5/1000 pddk			
					Persentase ibu hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu hamil	19 Puskesmas	100%				100%			
					Persentase ibu bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan Persalinan	19 Puskesmas	100%				100%			
					Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	19 Puskesmas	100%				100%			
					Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	19 Puskesmas	100%				100%			
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar	19 Puskesmas	100%				100%			
					Persentase orang usia 15-19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	100%				100%			
					Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	100%				100%			
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	100%				100%			
					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	100%				100%			
					Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	19 Puskesmas	100%				100%			

						Persentase orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	19 Puskesmas	100%					100%			
						Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	19 Puskesmas	100%					100%			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	19 Puskesmas	3718 Orang	1,148,430,000			DAK NF/DA	3718 Orang	1,349,386,860		
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	19 Puskesmas	3422 Orang	981,000,000			DAK NF/DA	3422 Orang	1,000,000,000		
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	19 Puskesmas	3259 Orang	149,820,000			DAK NF/DA U	3259 Orang	299,640,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	19.275 Orang	512,870,000			DAK NON	19.275 Orang	226,870,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pendidikan Dasar	19 Puskesmas	11.281 Orang	408,900,000			DAK NF/DA U	11.281 Orang	200,000,000		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	146.200 Orang	579,840,000			DAK NF/DA U	146.200 Orang	200,000,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Lanjut	19 Puskesmas	11.032 Orang	1,146,055,160			DAK NF/DA U	11.032 Orang	200,000,000		
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	3397 Orang	199,996,000			DAU	3397 Orang	200,000,000		
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	1012 Orang	199,996,000			DAU	1012 Orang	200,000,000		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	19 Puskesmas	13 Orang	126,140,000			DAU	13 Orang	200,000,000		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	19 Puskesmas	566 Orang	446,726,000			DAK NF/DA U	566 Orang	200,000,000		

						Persentase orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	19 Puskesmas	100%					100%			
						Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	19 Puskesmas	100%					100%			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	19 Puskesmas	3718 Orang	1,148,430,000			DAK NF/DA	3718 Orang	1,349,386,860		
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	19 Puskesmas	3422 Orang	981,000,000			DAK NF/DA	3422 Orang	1,000,000,000		
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	19 Puskesmas	3259 Orang	149,820,000			DAK NF/DA U	3259 Orang	299,640,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	19.275 Orang	512,870,000			DAK NON	19.275 Orang	226,870,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pendidikan Dasar	19 Puskesmas	11.281 Orang	408,900,000			DAK NF/DA U	11.281 Orang	200,000,000		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	146.200 Orang	579,840,000			DAK NF/DA U	146.200 Orang	200,000,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard Lanjut	19 Puskesmas	11.032 Orang	1,146,055,160			DAK NF/DA U	11.032 Orang	200,000,000		
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	3397 Orang	199,996,000			DAU	3397 Orang	200,000,000		
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	1012 Orang	199,996,000			DAU	1012 Orang	200,000,000		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	19 Puskesmas	13 Orang	126,140,000			DAU	13 Orang	200,000,000		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	19 Puskesmas	566 Orang	446,726,000			DAK NF/DA U	566 Orang	200,000,000		

1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai	19 Puskesmas	6300 Orang	446,726,000		DAK NF/DA	6300 Orang	400,000,000		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19 Puskesmas	4 Dokume	585,000,000		DAU	4 Dokume	588,948,275		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19 Puskesmas	1 Dokume	126,140,000		DAU	1 Dokume	200,000,000		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19 Puskesmas	1 Dokume	493,460,000		DAU	1 Dokume	1,186,258,000		
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan	19 Puskesmas	1 Dokumen	126,140,000		DAU	1 Dokumen	250,000,000		
1	02	02	2.02	20	Pelayanan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19 Puskesmas	1 Dokume	200,000,000		DAU	1 Dokume	200,000,000		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 Puskesmas	18 Dokumen	5,288,539,000		DAK NF/DAU	18 Dokumen	7,750,000,000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19 Puskesmas	3 Dokume	17,159,440,000		DAU	3 Dokume	18,969,765,496		
1	02	02	2.02	30	Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas Pelayanan	Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi Jarak jauh antar Fasyankes melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk mendapatkan Akses Pelayanan	PKM Supu, Bobaneigo, Malifut	3 Unit	500,000,000		DAK FISIK	3 Unit	500,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	19 Puskesmas	21 Dokumen	13,145,050,009		DAK NF/DAU	21 Dokumen	15,535,023,674		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	19 Puskesmas	19 Dokumen	14,959,316,073		BPJS	21 Dokumen	15,535,023,674		
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Klinik Pratama	1 Dokume	1,500,000,000		DAU	1 Dokume	3,787,454,906		
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten Kota	Puskesmas Bobaneigo, Dum-Dum, Supu, Dorume	5 Unit	768,330,000		DAK NF/DAU	5 Unit	1,268,955,000		

1	02	02	2.02	35	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam satu sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tobelo	1 Unit	100,000,000			DAU	1 Unit	300,000,000		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Presentase Puskesmas yang memiliki Sitem Informasi Kesehatan	Dinkes	32%	250,000,000			DAU	32%	250,000,000		
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinkes	1 Dokumen	250,000,000			DAU	1 Dokumen	250,000,000		
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter per satuan penduduk (per 2500 penduduk)	Dinkes	0.79	5,075,968,000			DAU	0.79	9,903,559,050		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di wilayah Kab/Kota	Persentase desa yang memiliki Tenaga Kesehatan	Dinkes	80%	4,446,000,000			DAU	80%	8,005,200,723		
						Rasio Bidan per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	Dinkes	2.47					2.47			
						Rasio Perawat per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	Dinkes	2.27					2.27			
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	19 Puskesmas, Dinkes	76 OK	4,446,000,000			DAU	76 OK	5,461,215,057		
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti diklat kompetensi	Dinkes	65%	629,968,000			DAU	65%	1,898,358,327		
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan mutu dan kompetensinya Kesehatan Tingkat Daerah	Dinkes	100 Orang	629,968,000			DAU	100 Orang	368,251,263		
1	02	04			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan Perizinan	Dinkes	85%	518,000,000			DAK NF/DAU	85%	150,000,000		

1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase peningkatan Jumlah P-IRT yang memiliki Sertifikat	Dinkes	40%	439,000,000		DAK NF/DAU	40%	100,000,000		
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes	1 Dokumen	439,000,000		DAK NF/DAU	1 Dokumen	100,000,000		
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase P4IRT yang dimonitoring	17 Kecamatan	79%	79,000,000		DAK NON FISIK	79%	50,000,000		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar yang dilakukan Pemeriksaan Post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	17 Kecamatan	60 Unit	79,000,000		DAK NON FISIK	60 Unit	50,000,000		
1	02	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	19 Puskesmas	72%	405,728,000		DAK NF/DAU	72%	625,000,000		
						Rasio jumlah posbindu PTM terhadap jumlah Desa	19 Puskesmas	90%			DAK NF/DAU	90%			
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Germas	19 Puskesmas	80%	239,588,000		DAK NF/DAU	80%	239,588,000		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	19 Puskesmas	2 Dokumen	239,588,000		DAK NF/DAU	2 Dokumen	239,588,000		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase puskesmas yang melakukan Pelayanan Promotif dan Preventif pada desa binaan	19 Puskesmas	80%	166,140,000		DAU	80%	385,412,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	19 Puskesmas	2 Dokumen	166,140,000.00		DAU	2 Dokumen	385,412,000		
JUMLAH									128,985,788,895				156,252,694,539		

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan 2024 ini mengacu pada Visi dan Misi Bupati Halmahera Utara yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan serta Rencana Strategis Departemen Kesehatan RI.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara bertujuan mencapai Sasaran serta Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2024 ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Keuangan dan Anggaran organisasi.

Kami menyadari bahwa dokumen rencana kerja ini masih jauh dari harapan. Karena itu masukan dan kritik membangun dari semua pihak sangat diperlukan agar dokumen rencana kerja ini dapat mengakomodir semua kepentingan pembangunan.

1. Catatan- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian :

- a. Angka Kematian Ibu Hamil dan Angka Kematian Bayi masih tinggi sehingga masih perlu mendapat perhatian yang sangat serius.
- b. Penanganan dan pencegahan Stunting atau masalah gizi disebabkan banyak faktor. Tidak hanya kurangnya asupan gizi, termasuk faktor lingkungan, seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan budaya. Sehingga perlu intervensi secara sensitive dan spesifik dengan melibatkan lintas sektor terkait.
- c. Meningkatkan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap.

2. Kaidah – kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan kesehatan didalam Renja Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan Kesehatan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2024-2026 tersebut, di dalam

pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan yang akan ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :Renja Dinas Kesehatan tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.

- a. Renja Dinas Kesehatan tahun 2024 fokus pada pencapaian target dari indikator SPM dan SDG's.
- b. Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber APBD maupun DAK
- d. Proses penyusunan Renja harus memperhatikan/ berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RPJMD, RKPD dan Renstra Dinas)
- e. Renja Dinas Kesehatan tahun 2024, menjadi acuan bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

3. Rencana tindak lanjut

Dari analisis kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan indikator SPM dan Indikator Kinerja Utama, rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan peningkatan kemampuan petugas kesehatan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan
- b. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan kebutuhan termasuk pengelolaan kesehatan yang berbasis IT.
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset

- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Proses Perbaikan berkelanjutan harus menjadi budaya dalam Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Utama yang berdampak positif pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pada akhirnya pada pencapaian tujuan kesehatan yang lebih baik.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan dan jajarannya baik pusat maupun Daerah serta masyarakat demi tercapainya visi dan misi Pemerintah daerah serta Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah.

Tobelo, September 2024

**Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Halmahera Utara**



Selpianus H. Kaya.S.Kep
NIP. 19680901 198801 1 001